



Peran Diplomasi Ekonomi Berkelanjutan dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Muhammad Farhan Surez

Universitas Riau Pekanbaru, Indonesia

Alamat: Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Korespondensi penulis: mfsurez@gmail.com

Abstract. *This article examines the strategic role of sustainable economic diplomacy in achieving the vision of Golden Indonesia 2045. Sustainable economic diplomacy is defined as diplomatic efforts aimed at promoting environmentally friendly and inclusive economic growth through strong international relations, trade agreements, economic cooperation, and foreign direct investment (FDI). The analysis shows that through economic diplomacy, Indonesia can gain access to international markets, attract FDI, foster innovation and technology transfer, and strengthen regional and multilateral cooperation. These strategies support inclusive and environmentally sustainable economic growth, helping Indonesia to overcome global challenges and achieve long-term development goals. Recommendations include strengthening the capacity of economic diplomacy, effective inter-agency coordination, and inclusive policies.*

Keywords: *Economic Diplomacy, Sustainable Development, Golden Indonesia 2045, Foreign Direct Investment, Multilateral Cooperation.*

Abstrak. Artikel ini membahas peran strategis diplomasi ekonomi berkelanjutan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Diplomasi ekonomi berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya diplomatik yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan dan inklusif melalui hubungan internasional yang kuat, perjanjian perdagangan, kerjasama ekonomi, dan investasi asing langsung (FDI). Analisis menunjukkan bahwa melalui diplomasi ekonomi, Indonesia dapat membuka akses pasar internasional, menarik FDI, mendorong inovasi dan transfer teknologi, serta menguatkan kerjasama regional dan multilateral. Strategi ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, membantu Indonesia mengatasi tantangan global dan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Rekomendasi mencakup penguatan kapasitas diplomasi ekonomi, koordinasi antar-lembaga, dan kebijakan inklusif.

Kata kunci: Diplomasi Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia Emas 2045, Investasi Asing Langsung, Kerjasama Multilateral.

1. LATAR BELAKANG

Visi Indonesia Emas 2045 atau juga dikenal dengan Wawasan Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita Indonesia yang ingin bangsa ini berusia seratus tahun pada tahun 2045 menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur (Bappenas, 2023). Tujuan tersebut ditetapkan untuk tahun 2045, karena itu adalah tanggal di mana negara akan merayakan seratus tahun kemerdekaan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Bappenas membuat visi tersebut, yang diumumkan oleh Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo pada 9 Mei 2019 (Alaydrus, 2019). Pada tahun 2045, dalam pidatonya, presiden mengatakan Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat atau kelima di dunia (Afifa, 2019).

Selama beberapa generasi, telah ada diskusi tentang visi masa depan Indonesia. Visi tersebut adalah negara maju yang akan beralih dari negara berkembang yang

bergantung pada pertanian dan komoditas mentah menjadi negara maju yang bergantung pada industri, jasa, dan teknologi. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), juga dikenal sebagai garis besar kebijakan negara, disusun selama pemerintahan Orde Baru Suharto dari sekitar tahun 1970-an hingga pertengahan tahun 1990-an. Tujuan dari GBHN adalah untuk mencapai fase ekonomi Lepas Landas seiring dengan transformasi negara menjadi negara industri baru. Namun, Indonesia sangat terpengaruh oleh krisis keuangan Asia 1997, yang menghentikan ekonomi dan menghambat pembangunan. Krisis ini menyebabkan perpecahan dan reformasi, yang akhirnya mengakhiri rezim Soeharto (Bunnell & Miller, 2011).

Perekonomian Indonesia telah pulih dalam beberapa tahun setelah akhir abad ke-21. Tren pertumbuhan dan pembangunan yang positif terus berlanjut. Setelah sepuluh tahun, Indonesia telah berhasil mengatasi badai tersebut. Dari negara yang hampir gagal pada tahun 1998 menjadi negara demokratis yang berkembang dan pada tahun 2007 menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di Asia. Ini telah meningkatkan harapan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota G20 yang mewakili Asia Tenggara pada tahun 2009 (Deny, 2018).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidatonya di Bali pada Juni 2013, pada HUT ke-100 Republik Indonesia, ia mengatakan bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara maju dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial serta memiliki pengaruh internasional yang signifikan di wilayah tersebut (Detik News, 2013). Selain itu, bonus demografi diperkirakan akan membantu Indonesia berkembang menuju visi negara maju pada tahun 2045 (Tempo, 2018). Pada periode tersebut, jumlah angkatan kerja atau penduduk usia produktif (di antara usia 15 dan 64 tahun) lebih besar daripada penduduk usia non produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Dengan demikian, jumlah penduduk usia produktif tersebut diperkirakan mencapai 64% dari jumlah total penduduk Indonesia.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menulis buku catatan "Impian Indonesia 2015–2085" pada tanggal 30 Desember 2015 di Merauke, yang kemudian disempurnakan oleh Bappenas pada tahun 2017, yang mencakup tujuh impian besar untuk masa depan Indonesia, yaitu: Indonesia adalah negara yang merdeka, bebas, dan paling cerdas di dunia; masyarakatnya yang menganut pluralisme, budaya, agama, dan etika; dan merupakan pusat peradaban, pendidikan, dan teknologi di dunia; dan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia (Bappenas, 2017). Pada 9 Mei 2019, Presiden Joko Widodo resmi mencanangkan visi tersebut. Dalam visinya, pemerintah berharap Indonesia akan

menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia pada tahun 2045, dengan PDB sebesar US\$7,3 triliun dan pendapatan per kapita US\$25.000 (Alaydrus, 2019).

Pada pidato pelantikan periode keduanya di Gedung DPR/MPR pada 20 Oktober 2019 (Tehusijarana, 2019), Presiden Joko Widodo mengulangi tujuan tersebut dan menetapkan lima kebijakan untuk diterapkan selama masa pemerintahannya yang kedua dari tahun 2019 hingga 2024, yaitu: untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur; meningkatkan sumber daya manusia; mendorong investasi sebanyak mungkin; reformasi birokrasi; dan memastikan belanja APBN lebih terarah dan sesuai dengan tujuan (Bramasta & Hardiyanto, 2019). Agar terwujud, visi Indonesia Emas 2045 dibangun atas empat pilar menurut Pancasila dan UUD 1945, pilar-pilar tersebut adalah: Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan manusia, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan ketahanan dan tata kelola nasional (Nurhanisah, 2020).

Berbagai studi terdahulu telah membuktikan ada berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pertama, studi yang dilakukan oleh (Samudro et al., n.d.) membahas tentang kontribusi dari ilmu pertahanan terhadap visi Indonesia Emas 2045. Dalam penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa ilmu pertahanan akan berperan penting dalam rangka menyambut tahun 2045, di mana pada tahun tersebut perekonomian global akan dua kali lipat dari sekarang dan berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk global yang diperkirakan mencapai 9,8 miliar orang. Ilmu pertahanan akan berperan penting karena modernisasi, termasuk konektivitas, semakin meningkat di banyak negara berkembang, *shared economy* dan masyarakat tanpa uang akan menjadi lebih umum. Indonesia harus terus memperhatikan potensi bahaya dan mempersiapkan diri untuk krisis keuangan dan ekonomi dalam tiga puluh tahun mendatang jika ketimpangan ekonomi global terus terjadi.

Kedua, studi yang dilakukan oleh (Wihiyawari et al., 2023) membahas tentang pentingnya meningkatkan strategi daya saing industri pertahanan Indonesia dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045. Industri pertahanan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana Indonesia tengah menghadapi pelbagai tantangan keamanan dan stabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara pemenuhan standar global, kolaborasi antar pemangku kepentingan, pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi teknologi, dan peningkatan kemampuan produksi.

Ketiga, studi yang dilakukan oleh (Rostini, 2023) membahas tentang SDG's sebagai salah satu aspek yang penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mencapai 17 tujuan dari SDG's, maka siswa dan pendidikan merupakan aset penting dalam mempersiapkan visi Indonesia Emas 2045 yang akan memberikan solusi terhadap permasalahan global. Dengan memahami peran penting siswa dalam pembelajaran diferensia, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif siswa dalam setiap kegiatan dapat membantu siswa mempelajari dan memahami SDG's serta menciptakan solusi inovatif dan inklusif untuk masalah lingkungan dan sosial di dunia nyata melalui diskusi, simulasi, dan proyek nyata. Mereka juga dapat meningkatkan kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah komponen penting dari pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Ada berbagai instrumen yang telah dilakukan untuk menerapkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Artikel ini ditulis dengan fokus kepada eksplorasi bagaimana diplomasi ekonomi dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam peta global menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Artikel ini ditulis dengan landasan teori pembangunan berkelanjutan oleh (Sachs, 2015). Teori ini muncul berangkat dari pandangan Sachs bahwasanya krisis lingkungan yang sangat besar disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang luar biasa. Krisis ini mengancam kehidupan dan kesejahteraan miliaran orang serta kelangsungan hidup jutaan spesies lain di Bumi, termasuk spesies manusia sendiri. Selanjutnya, dia menyatakan bahwa ancaman lingkungan meningkat di banyak bidang secara bersamaan. Ini termasuk perubahan iklim, kekurangan air bersih, kimiawi lautan, dan habitat spesies yang berbeda. Jika dunia tidak mengadopsi pendekatan baru, manusia pada abad kedua puluh satu akan melampaui batas operasi yang aman. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan adalah solusi dari krisis yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi global. Sisi normatif pembangunan berkelanjutan harus mencakup empat tujuan dasar masyarakat yang baik: kemakmuran ekonomi; inklusi dan koherensi sosial; ketahanan lingkungan; dan tata kelola yang baik oleh aktor sosial utama, seperti pemerintah dan bisnis. Ini dikenal sebagai model empat faktor. Konsep dasar ini berfungsi sebagai landasan untuk pekerjaan Sachs tentang tujuan normatif pembangunan berkelanjutan.

Teori selanjutnya yang menjadi landasan dalam penulisan artikel ini adalah teori diplomasi ekonomi. Menurut (Rana, 2007) diplomasi ekonomi adalah "proses yang dilakukan negara-negara dalam menghadapi dunia luar, untuk memaksimalkan keuntungan nasional mereka di semua bidang kegiatan termasuk perdagangan, investasi dan bentuk pertukaran yang menguntungkan secara ekonomi, di mana mereka menikmati keunggulan komparatif; ia memiliki dimensi bilateral, regional, dan multilateral, yang masing-masingnya penting." Untuk mencapai kepentingan negara, diplomasi ekonomi menggunakan semua alat ekonominya (Chohan, 2021). Diplomasi ekonomi dapat mencakup seluruh kegiatan ekonomi internasional suatu negara. Ini dapat mencakup keputusan kebijakan yang memengaruhi investasi, ekspor, impor, pinjaman, bantuan, perjanjian perdagangan bebas, dan lain-lain (Armstrong, 2021). Diplomasi ekonomi berkaitan dengan masalah kebijakan ekonomi, misalnya. pekerjaan delegasi di organisasi penetapan standar seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Diplomat ekonomi juga memantau dan melaporkan kebijakan ekonomi di negara-negara asing dan memberikan nasihat kepada pemerintah negara asal mengenai cara terbaik untuk mempengaruhi atau memaksa mereka. Diplomasi ekonomi menggunakan sumber daya ekonomi, baik sebagai imbalan atau sanksi, dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri tertentu. Hal ini kadang-kadang disebut "kenegaraan ekonomi" (Saner & Yiu, 2006).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur artikel, jurnal, buku, ataupun situs online yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data penelitian melalui buku, jurnal, maupun artikel yang ada di internet yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis reduksi data. Reduksi data berarti data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka ataupun penelusuran online, digunakan sesuai dengan keperluan penelitian berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini ditujukan agar supaya data yang digunakan memiliki korelasi dengan perumusan masalah yang dibuat. Peneliti menghubungkan teori atau konsep yang digunakan dengan data-data yang diperoleh sebagai pijakan bagi peneliti dalam memahami dan melakukan analisa dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi Ekonomi Berkelanjutan dalam Konteks Indonesia Emas 2045

Dalam Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia ingin menjadi negara maju dengan ekonomi inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2045. Indonesia harus menghadapi banyak tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, dan persaingan ekonomi yang ketat untuk mencapai visi ini. Dalam situasi seperti ini, diplomasi ekonomi berkelanjutan menjadi alat penting untuk membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan jangka panjangnya (Bappenas, 2021). Diplomasi ekonomi berkelanjutan sangat penting karena diplomasi ekonomi berkelanjutan adalah upaya diplomatik yang berfokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan melalui perjanjian perdagangan, kerja sama ekonomi, dan investasi asing langsung (FDI). Pendekatan ini menekankan betapa pentingnya integrasi antara kebijakan ekonomi dan lingkungan serta integrasi sosial dalam diplomasi.

Peran Strategis Diplomasi Ekonomi dalam Mencapai Indonesia Emas 2045

a. Memfasilitasi Akses ke Pasar Internasional

Diplomasi ekonomi yang efektif dapat membuka akses ke pasar internasional, memungkinkan produk dan jasa Indonesia untuk bersaing di panggung global. Indonesia mengaktualisasikan diplomasi ekonominya dalam rangka memfasilitasi akses ke pasar internasional dengan cara melakukan Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA). FTA adalah perjanjian perdagangan internasional antara dua atau lebih pihak yang mengadakan perjanjian yang mengatur pengenaan resiprokal tarif preferensi di antara mereka (Urata, 2002). Sampai September 2023, Indonesia telah menandatangani 18 FTA dalam bentuk regional, bilateral, dan multilateral. ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement (AHKFTA), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dan Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement adalah beberapa dari FTA yang berlaku di Indonesia (Beacukai, 2024).

Selain FTA, Indonesia juga melakukan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Para

pemimpin dari 16 negara peserta membentuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yang dibangun berdasarkan FTA ASEAN+1 yang sudah ada. RCEP bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi, meningkatkan kegiatan terkait perdagangan dan investasi, dan membantu mengurangi jurang pembangunan di antara negara-negara peserta. Perundingan RCEP dimulai pada awal tahun 2013 dengan tujuan untuk mencapai perjanjian kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan antara Negara Anggota ASEAN dan mitra FTA ASEAN. Perjanjian ini mencakup topik seperti perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa, e-commerce, usaha kecil dan menengah (UKM), dan isu-isu lain (ASEAN, 2024).

Dengan ikut serta melakukan FTA dan RCEP, Indonesia dapat menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif, meningkatkan ekspor, dan menarik investasi asing. Ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

b. Menarik Investasi Asing Langsung (FDI)

Investasi Asing Langsung (FDI) adalah jenis penanaman modal lintas negara di mana investor yang berdomisili di suatu perekonomian memiliki kepentingan jangka panjang dan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan yang berdomisili di perekonomian lain. Kepemilikan 10% atau lebih hak suara perusahaan di suatu perekonomian merupakan bukti adanya hubungan ini. FDI memainkan peran penting dalam integrasi ekonomi internasional karena mereka menciptakan hubungan perekonomian yang stabil dan bertahan lama. FDI juga merupakan jalan penting untuk transfer teknologi antar negara, mendorong perdagangan internasional melalui akses ke pasar luar negeri, dan dapat berfungsi sebagai alat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (OECD Library, 2024). FDI dapat dilakukan dalam tiga cara: dengan membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada, menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di negara lain, atau dengan membeli saham sekurang-kurangnya 10%.

Karena banyaknya alasan negara asing tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia, salah satunya adalah biaya murah yang dapat diakses oleh pihak asing. Ini membuat Indonesia memiliki potensi investasi langsung asing yang besar. Jadi, pabrik di Indonesia sering dimiliki oleh negara asing melalui FDI. Dengan mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1) pada tahun 1967, investasi

asing pertama kali digunakan untuk membangun ekonomi Indonesia. Peraturan ini sudah sah dan didengar oleh negara lain, jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk menanamkan modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertanggung jawab atas persetujuan dan izin investasi asing langsung (Puriadji, 2017).

Namun, sejak dikeluarkannya UU tahun 1967 tersebut, terdapat berbagai masalah dalam investasi asing di Indonesia. Infrastruktur dan birokrasi masih menjadi masalah utama bagi investasi di Indonesia. Namun, jumlah dan kualitas infrastruktur yang cukup adalah kunci keberhasilan suatu negara dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Biaya produksi dapat meningkat sebagai akibat dari hambatan dari negara tuan rumah, seperti kegagalan infrastruktur, yang dapat mengakibatkan penurunan daya saing harga dan penurunan ekspor. Hasil tambahan adalah penurunan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia sebagai negara tuan rumah, yang akan berdampak pada produksi dan ekspor di dalam negeri. Tidak adanya investasi langsung asing ke Indonesia juga dipengaruhi oleh birokrasi yang tidak efektif. Ini karena banyak pejabat tinggi pemerintah yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang dekatnya, serta untuk melindungi dan mengangkat kepentingan bisnis pribadi mereka sendiri.

Pemerintah telah merespon hambatan-hambatan tersebut dengan membuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perekonomian Indonesia mulai mengalami perbaikan secara bertahap, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan yang mendasar untuk masuknya dan berjalannya investasi ke Indonesia, yaitu perbaikan di sektor pelayanan dan sektor-sektor yang dapat dimasuki oleh investor yang ingin meningkatkan investasi mereka. Peraturan teknis seperti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal telah meningkatkan dan meningkatkan prospek investasi FDI di Indonesia (Anugrah, 2011).

Tidak termasuk investasi di sektor perbankan, minyak dan gas, investasi asing langsung ke Indonesia meningkat 20,2 persen tahun-ke-tahun. Ini mencapai rekor tertinggi sebesar Rp 177 triliun (US\$ 11,96 miliar) pada kuartal pertama tahun 2023 di tengah upaya pemerintah untuk meringankan aturan usaha dan perizinan. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM), Indonesia

menerima investasi asing tertinggi sebesar US\$43 miliar pada tahun 2022, naik sebesar 44% dari tahun sebelumnya. Bersama-sama dengan investasi dalam negeri, Indonesia memperoleh investasi sebesar 1.207 triliun rupiah—atau 80 miliar dolar AS—yang merupakan peningkatan 34% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, industri pertambangan dan logam menarik investasi asing sebesar lebih dari US\$16 miliar, dengan total FDI mencapai lebih dari US\$16 miliar. Pada tahun 2023, pemerintah memperkirakan investasi asing dan domestik sebesar 1,400 triliun rupiah (US\$92 miliar) dan 1,650 triliun rupiah (US\$108 miliar) pada tahun 2024 (ASEAN BRIEFING, 2024).

Diplomasi ekonomi dapat membantu Indonesia menarik lebih banyak FDI, yang penting untuk pembangunan infrastruktur, teknologi, dan industri. Investasi asing dapat membawa modal, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan sektor strategis seperti manufaktur berkelanjutan, energi terbarukan, dan teknologi informasi.

c. Menguatkan Kerjasama Regional dan Multilateral

Partisipasi aktif dalam organisasi regional dan multilateral seperti ASEAN, APEC, dan G20 dapat membantu Indonesia dalam menentukan kebijakan ekonomi global. Melalui platform ini, Indonesia dapat mendorong agenda pembangunan berkelanjutan, mendukung perdagangan yang adil, dan bekerja sama untuk memerangi krisis kesehatan dan perubahan iklim.

Dalam konteks kerjasama Indonesia dan ASEAN, Indonesia telah banyak berupaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan ASEAN. Pada tahun 2023, Indonesia yang memegang peran sebagai Keketuaan ASEAN, Melalui tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth", Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 berfokus pada penguatan ekonomi kawasan yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan serta dapat bertransformasi menjadi kawasan yang berkomitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga akan memperkuat implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang inklusif untuk kawasan yang damai, saling terhubung, inklusif, dan kompetitif. Selain itu, dengan mengacu pada target capaian utama yang telah ditetapkan, Kejuaraan Indonesia pada ASEAN 2023 akan berfokus pada tiga masalah ekonomi utama: pemulihan dan pemulihan, ekonomi digital, dan ketahanan. Pertama, Indonesia akan mendorong prospek pemulihan untuk membangun kembali pertumbuhan regional, konektivitas, dan daya saing, serta meningkatkan ketahanan pangan dan keuangan dengan memastikan

rantai pasok pangan. Kedua, mereka akan berusaha mempercepat transformasi ekonomi digital yang inklusif dan partisipatif, serta meningkatkan infrastruktur digital yang berkualitas untuk menjembatani kesenjangan. Ketiga, mereka akan menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi digital (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023).

Dalam konteks kerjasama Indonesia dan APEC, Indonesia turut aktif dalam penguatan kerjasama ekonomi global. Pasca pandemi COVID-19, pada 9 November 2021, Wakil Menteri Luar Negeri RI menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri dari 21 ekonomi anggota mengikuti pertemuan secara online. Para menteri APEC berkumpul untuk membahas bagaimana mempercepat pemulihan ekonomi Asia Pasifik melalui kerja sama ekonomi dan teknis, seperti meningkatkan sistem kesehatan, membantu pergerakan lintas batas, memperkuat ekonomi digital, dan mendorong perempuan dan UMKM. Dalam pertemuan ini, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menekankan betapa pentingnya APEC untuk mendorong: (1) mobilitas orang di kawasan Asia Pasifik; (2) memperbaiki rantai pasokan global dan pemulihan sistem logistik yang terkena dampak pandemi COVID-19; dan (3) mengutamakan pembangunan yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan iklim. Pertemuan Tingkat Menteri APEC mengeluarkan Pernyataan Bersama Menteri APEC yang menggambarkan hasil kerja APEC selama 2021. Ini termasuk upaya APEC untuk menangani pandemi COVID-19 dengan memperkuat sistem kesehatan, bekerja sama untuk membuat vaksin, membuka perbatasan, menggunakan ekonomi digital dan teknologi, dan mendukung masalah lingkungan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Dalam konteks kerjasama Indonesia dan G20, Indonesia turut aktif dalam melakukan penguatan kerjasama ekonomi dalam kerangka G20. Mendapatkan kesempatan emas sebagai pemegang Presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia memanfaatkan momentum untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diaktualisasikan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan bilateral dengan Jake Sullivan, Wakil Presiden untuk Urusan Keamanan Nasional (APNSA) Amerika Serikat. Menteri Perindustrian, Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional dari Kemenko Perekonomian, dan Duta Besar Amerika Serikat di Washington DC semuanya menghadiri pertemuan tersebut. Pertemuan bilateral berlangsung secara

akrab dan konstruktif, membahas banyak hal, seperti dukungan AS terhadap Presidensi G20 Indonesia, pembentukan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), dan pengembangan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Selain itu, diskusi konstruktif membahas minat kedua negara untuk bekerja sama dalam skema PGII untuk investasi dan pembangunan infrastruktur. Sebagaimana diumumkan oleh pemerintah AS pada bulan Juni tahun ini, AS akan menggelontorkan pendanaan sebesar USD600 Miliar untuk pembiayaan investasi dan infrastruktur di berbagai negara. Menko Airlangga dan APNSA Sullivan berbicara tentang proyek transisi energi berbasis teknologi. Percepatan transisi energi ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan lainnya adalah topik wacana lainnya. Sebelum pertemuan berakhir, pembicaraan terus berlanjut tentang kemungkinan kerja sama dalam masalah konektivitas. Menko Perekonomian juga menggunakan pertemuan tersebut untuk menunjukkan potensi Indonesia dalam rantai pasokan global. Setelah pertemuan berakhir, Menko Airlangga dan APNSA Sullivan setuju untuk menugaskan pejabat masing-masing untuk segera menindaklanjuti hasil diskusi di level teknis (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu cara untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 adalah melalui diplomasi ekonomi berkelanjutan. Diplomasi ekonomi memungkinkan Indonesia untuk menarik investasi asing langsung (FDI), meningkatkan inovasi dan transfer teknologi, dan meningkatkan kerjasama regional dan multilateral. Selain itu, Indonesia memiliki kemampuan untuk meningkatkan reputasinya di mata dunia dengan memanfaatkan soft power. Ini akan meningkatkan daya tariknya sebagai tempat investasi dan mitra dagang. Semua strategi ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, yang merupakan tujuan utama dari Visi Indonesia Emas 2045.

Saran berdasarkan hasil penelitian ini adalah, Indonesia setidaknya harus melakukan: 1). peningkatan kemampuan diplomasi ekonomi harus dilakukan melalui pelatihan khusus bagi diplomat dan pegawai pemerintah yang menangani masalah ekonomi dan lingkungan internasional. Sangat disarankan untuk membentuk unit khusus untuk menangani masalah ekonomi hijau di Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait. 2). sangat penting untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam diplomasi dan kebijakan ekonomi. Ini akan memastikan

bahwa kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan akan konsisten dan bekerja sama. 3). pemerintah harus membuat kebijakan yang inklusif dan menyeluruh yang melihat pertumbuhan ekonomi dan aspek sosial dan lingkungan. Kebijakan ini harus melibatkan masyarakat sipil, serta sektor swasta dan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Afifa, L. (2019). Jokowi's vision for Indonesia: World's largest economy by 2045. *Tempo*. <https://en.tempo.co/read/1203633/jokowis-vision-for-indonesia-worlds-largest-economy-by-2045>
- Alaydrus, H. (2019). Visi Indonesia 2045: Indonesia targetkan jadi ekonomi terbesar kelima. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190509/9/920475/visi-indonesia-2045-indonesia-targetkan-jadi-ekonomi-terbesar-kelima>
- Anugrah, A. (2011). Implementasi foreign direct investment (FDI) di Indonesia (sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal). *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 6(2), 140–149.
- Armstrong, S. (2021). Economic diplomacy and economic security under Abe. *Asian Economic Policy Review*, 16(2), 283–299. <https://doi.org/10.1111/aepr.12335>
- ASEAN BRIEFING. (2024). Economic indicators and Indonesia's GDP, FDI, and trade trends. <https://www.aseanbriefing.com/doing-business-guide/indonesia/why-indonesia/indonesia-economy>
- ASEAN. (2024). The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). <https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/the-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep/>
- Bappenas. (2017). *Visi Indonesia 2045*. Kementerian PPN/Bappenas. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/BahanPaparanMPPN-VisiIndonesia2045-25September2017.pdf>
- Bappenas. (2021). *Visi Indonesia 2045: Pembangunan berkelanjutan*. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrFBnUfiEVm9wMAq.JXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1717042463/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.bappenas.go.id%2Ftags-berita%2F340/RK=2/RS=KNbgckTboOWtGv7xXt8WkGr6TsA-
- Bappenas. (2023). *The golden vision of Indonesia 2045*. <https://indonesia2045.go.id/>
- Beacukai. (2024). Sekilas FTA. <https://fta.beacukai.go.id/sekilas-fta/>
- Bramasta, D. B., & Hardiyanto, S. (2019). 5 visi Jokowi untuk Indonesia. *Kompas*. https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/151257765/5-visi-jokowi-untuk-indonesia?debug=1&lgn_method=google&google_btn=onetap

- Bunnell, T., & Miller, M. A. (2011). Jakarta in post-Suharto Indonesia: Decentralisation, neo-liberalism and global city aspiration. *Space and Polity*, 15(1), 35–48.
- Chohan, U. W. (2021). Economic diplomacy: A review. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3762042>
- Deny, S. (2018). Jokowi: Masuk G20, bukti RI negara besar. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3279859/jokowi-masuk-g20-bukti-ri-negara-besar>
- Detik News. (2013). Ini visi Presiden SBY untuk Indonesia 2045. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-2274033/ini-visi-presiden-sby-untuk-indonesia-2045>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). Pemerintah AS dukung presidensi G20 Indonesia dan dorong penguatan kerja sama ekonomi bilateral. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4649/pemerintah-as-dukung-presidensi-g20-indonesia-dan-dorong-penguatan-kerja-sama-ekonomi-bilateral>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). Fokus pada penguatan ekonomi kawasan yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan, Indonesia jalankan keketuaan ASEAN 2023. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4869/fokus-pada-penguatan-ekonomi-kawasan-yang-tumbuh-cepat-inklusif-dan-berkelanjutan-indonesia-jalankan-keketuaan-asean-2023>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). Indonesia dorong penguatan kerja sama APEC dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3136/berita/indonesia-dorong-penguatan-kerja-sama-apec-dalam-pemulihan-ekonomi-pascapandemi-covid-19>
- Nurhanisah, Y. (2020). 4 pilar visi Indonesia 2045. *Indonesia Baik*. <https://indonesiabaik.id/infografis/4-pilar-visi-indonesia-2045>
- OECD Library. (2024). Foreign direct investment (FDI). https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/foreign-direct-investment-fdi/indicator-group/english_9a523b18-en
- Puriadji, A. (2017). FDI di Indonesia. *Binus University*. <https://bbs.binus.ac.id/ibm/2017/11/fdi-di-indonesia/>
- Rana, K. S. (2007). Economic diplomacy: The experience of developing countries. In *The new economic diplomacy: Decision making and negotiations in international relations* (pp. 201–220). Ashgate.
- Rostini, D. (2023). Role of students in sustainable achievement 17 development goals to prepare golden generation in 2045. *Journal of Business*, 16(2), 431–445. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2023-0000032>
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.

- Samudro, E. K. O. G., Sumantri, S. H., & Anwar, S. (n.d.). Defense science in contributing Indonesia economic growth: Indonesia 2045. *Journal of Business*, 1008–1022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7252547>
- Saner, R., & Yiu, L. (2006). International economic diplomacy: Mutations in post-modern times. *Discussion Papers in Diplomacy*, Netherlands Institute of International Relations “Clingendael,” 41.
- Tempo. (2018). Demographic bonus boosts Indonesia toward development in 2045. *Tempo*. <https://en.tempo.co/read/924084/demographic-bonus-boosts-indonesia-toward-development-in-2045>
- Urata, S. (2002). Globalization and the growth in free trade agreements. *Asia-Pacific Review*, 9(1), 20–32. <https://doi.org/10.1080/13439000220141569>
- Wihyawari, S. A., Sudiarso, A., & ... (2023). Strategy to build defense industry competitiveness in welcoming golden Indonesia 2045. *Journal of Business*, 3(5), 1863–1872. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijba/article/view/5601>